

**EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN PERMUKIMAN (RPP)
DI KABUPATEN BANTUL**

Oleh :
Edi Purwanto¹⁾

The earthquake, which happened on May 2006 in Bantul Regency, has caused severe failure to physical infrastructures as well as community neighborhoods. The World Bank through Java Reconstruction Fund (JRF) gave funds and assistance for several villages in Bantul Regency in the form of Community Settlement Plan (CSP). This plan is a middle-range development encompassing five year period in the field of community settlement. CSP is a breakthrough for village people but its benefit and its implementation is not known. This research evaluates CSP from the point of view of community and plan implementation performance.

This research was conducted in 12 villages in Bantul Regency. These villages are the first villages that completed community settlement planning process in 2007. The method used in the research was descriptive-quantitative, i.e. by means of questionnaire survey for gathering data about people perception to CSP, secondary data survey for obtaining data about the percentage of CSP implementation, and interview survey for analyzing the factors influencing CSP implementation performance.

The research indicates that most respondents have positive perception about CSP while in other side the CSP implementation performance is varied and relatively low. There are six factors influencing the performance of CSP implementation, i.e. fund or money source (Devas and Rakodi, 1993) or financial resources (Grindle, 1980), activity variation or plan clarity (Presman and Wildavsky, 1973), community support or group support (Warwick, 1979), activity number or plan complexity (Presman and Wildavsky, 1973), technique or information (Goggin et. al., 1990), and community consciousness or commitment (Edward III, 1980).

There is contradictive result between community perception about CSP and performance of CSP implementation. In one aspect, respondents have positive perception about CSP, but on the other hand, the performance of CSP implementation is relatively low. This is caused by the fact that village people have high awareness to everything related to the development of their places, but they lack resources, especially financial resources.

1. Edi Purwanto adalah Alumnus MPKD UGM Yogyakarta tahun 2010, saat ini bekerja di Bappeda Kabupaten Bantul

I. PENDAHULUAN

Pada bulan Mei 2006 terjadi gempa bumi di Kabupaten Bantul. Ratusan ribu bangunan yang meliputi rumah tinggal, fasilitas publik, fasilitas sosial, fasilitas ekonomi, dan sebagainya, mengalami kehancuran. Diperlukan kerja keras dan anggaran yang besar untuk memulihkannya.

Salah satu pihak yang peduli dengan bencana tersebut adalah Bank Dunia melalui JRF (*Java Reconstruction Fund*) yang memberikan bantuan dana lingkungan (BDL) kepada Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Klaten) dan Provinsi DIY (Kabupaten Bantul). Salah satu komponen pada bantuan tersebut adalah pembiayaan serta pemberian bimbingan dan pendampingan kepada setiap desa untuk membuat sendiri Rencana Pembangunan Permukiman (RPP). Tetapi disebabkan oleh keterbatasan dana maka tidak semua desa yang ada di Kabupaten Bantul memperoleh bantuan ini. Hanya desa-desa terpilih saja yang mendapatkannya dengan jumlah keseluruhan sebanyak 26 desa (12 desa di tahun 2007 dan 14 desa di tahun 2008).

RPP tersebut merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang mencakup periode perencanaan selama lima tahun (2008 s/d 2012). Rencana ini disebut juga dengan istilah *Community Settlement Plan* (CSP) yang disusun berdasarkan aspirasi kebutuhan dan cita-cita masyarakat untuk memperbaiki lingkungan permukimannya serta mendukung kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. RPP memuat kegiatan-kegiatan pembangunan tahunan yang akan dilakukan selama

kurun waktu lima tahun, termasuk anggaran dan sumber pendanaannya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memandang RPP desa merupakan sesuatu yang positif. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2009 Pemda Kabupaten Bantul meneruskan program penyusunan RPP untuk desa-desa yang belum menerima bantuan ini. Direncanakan seluruh desa yang ada di Bantul akan diberi bantuan untuk menyusun RPP dengan mekanisme dan prosedur sama dengan yang dilakukan oleh JRF.

RPP merupakan sesuatu yang baru, khususnya bagi desa-desa di Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan RPP merupakan rencana pembangunan jangka menengah di tingkat desa yang proses penyusunannya dilakukan sendiri oleh warga desa. Oleh karena itu belum diketahui manfaat rencana ini, khususnya bagi warga desa. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi tentang bagaimana pandangan masyarakat desa terhadap manfaat RPP.

Langkah selanjutnya setelah RPP selesai disusun adalah implementasinya. Dari seluruh kegiatan tahunan yang direncanakan, kegiatan-kegiatan mana saja yang dapat direalisasikan dan mana yang tidak dapat direalisasikan. Perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui pencapaian implementasi RPP dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat pencapaian tersebut.

Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana pandangan masyarakat desa terhadap keberadaan RPP, mengkaji tingkat keberhasilan implementasi rencana pembangunan permukiman, dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi rencana pembangunan

permukiman. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penyempurnaan implementasi rencana yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, khususnya implementasi rencana pembangunan permukiman pasca gempa bumi. Harapan lainnya adalah memberikan masukan bagi penelitian lain yang sejenis terutama pada penelitian bidang studi perencanaan pembangunan secara umum dan khususnya perencanaan bidang permukiman. Yang terakhir penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah setempat maupun kalangan praktisi terutama dalam hal pelaksanaan rencana pembangunan permukiman pasca gempa bumi.

II. LANDASAN TEORI

Persepsi merupakan proses penginterpretasian stimulus (rangsangan) yang diterima individu melalui penginderaan sehingga menjadi sesuatu yang memiliki arti dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri setiap individu. Persepsi dapat dipengaruhi oleh a) faktor eksternal, yaitu stimulus itu sendiri dan lingkungan tempat stimulus itu berada/berlangsung dan b) faktor internal, yaitu segala sesuatu yang berasal dari dalam diri individu seperti perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman, pengetahuan, dan sebagainya. Bila obyek persepsi berada di luar orang yang mempersepsi maka obyek persepsi itu dapat berwujud benda, situasi, atau manusia.

Mempersepsikan orang berbeda dengan mempersepsikan benda sebab orang mempunyai kemampuan, perasaan, harapan, dan sebagainya sehingga kadarnya selalu berbeda. Hal ini berarti orang yang dipersepsi dapat memberikan pengaruh kepada orang yang mempersepsikannya.

Selain itu, Kuswartojo, T. (1997) mengemukakan keberlanjutan program dapat dikaji dengan melihat: (a) adanya peningkatan kualitas hidup manusia; (b) pemanfaatan sumber daya; (c) kelembagaan dan kepengurusan lembaga yang profesional; (d) dampak sosial dan ekonomi; dan (e) pemerintahan yang baik. Sejalan dengan itu, menurut Setiawan, B. (2003), berkaitan dengan evaluasi kegiatan program yang berorientasi pada pembangunan masyarakat (*community development*), kriteria evaluasi yang dapat digunakan dari aspek sustainabilitas program adalah: (a) apakah proyek dilanjutkan oleh komunitas; (b) apakah ada *multiplier effect* dari program; (c) apakah telah terjadi *transfer of knowledge/technology*; dan (d) apakah terjadi pengembangan kapasitas komunitas (*community building*).

Berdasarkan berbagai macam teori implementasi yang ada, dapat dirangkum beberapa simpulan tentang implementasi dengan diketahuinya dua prinsip utama dalam proses pencapaian tujuan yaitu kegagalan atau keberhasilan. Di sisi lain, faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi mencakup faktor internal dan faktor eksternal, sebagaimana yang dirumuskan oleh masing-masing ahli berikut ini:

- Menurut Goggin et. al. (1990), faktor yang mempengaruhi implementasi dibedakan menjadi faktor internal berupa organisasi dan struktur birokrasi dan faktor eksternal berupa komitmen implementator, komunikasi, dan informasi yang diterima.
 - Menurut Devas dan Rakodi (1993), faktor yang mempengaruhi implementasi adalah keterampilan teknis, sumber keuangan, kekuasaan legal, dan kompetisi kelembagaan.
 - Menurut Presman dan Wildavsky (1973), faktor yang mempengaruhi implementasi adalah dukungan politis, kejelasan rencana, dan kompleksitas rencana.
 - Menurut Edward III (1980), faktor yang mempengaruhi implementasi adalah sumber daya staf (ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu), disposisi (sikap dan komitmen dari pelaksana program/ birokrat), komunikasi (kejelasan informasi, dan konsistensi informasi), struktur birokrasi, serta standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana.
 - Menurut Warwick (1979) faktor yang mempengaruhi implementasi adalah kemampuan organisasi, komitmen pemimpin politis, komitmen implementator, dan dukungan kelompok yang berkepentingan.
 - Menurut Grindle (1980) faktor yang mempengaruhi implementasi adalah kebijakan, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, sumber daya, serta dalam konteks implementasi, karakteristik lembaga, kepatuhan, dan daya tanggap.
- Jika dikompilasi seluruh pendapat para ahli tersebut di atas maka diperoleh 20 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, sebagai berikut: (1) Organisasi; (2) Kejelasan rencana; (3) Struktur birokrasi; (4) Kompleksitas rencana; (5) Komitmen; (6) Sumber daya manusia; (7)

Tabel 1
Desa-desa yang telah menyusun RPP pada tahun 2007

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Tipologi Bencana
1	Karang Tengah	Imogiri	Longsor & banjir
2	Srimartani	Piyungan	Longsor & kekeringan
3	Trimulyo	Jetis	Longsor & banjir
4	Gadingharjo	Sanden	Tsunami, banjir, & kekeringan
5	Sitimulyo	Piyungan	Longsor & kekeringan
6	Poncosari	Srandakan	Tsunami & banjir
7	Seloharjo	Pundong	Longsor & kekeringan
8	Wonokromo	Pleret	Gempa bumi & banjir
9	Sumbermulyo	Bambanglipuro	Kekeringan & banjir
10	Caturharjo	Pandak	Longsor & banjir
11	Argorejo	Sedayu	Longsor, kekeringan, & banjir
12	Terong	Dlingo	Longsor & kekeringan

(Sumber: District Management Consultant, Rekompak)

Komunikasi; (8) Dukungan kelompok; (9) Informasi; (10) Kebijakan; (11) Keterampilan teknis; (12) Derajat perubahan; (13) Sumber dana; (14) Letak pengambilan keputusan; (15) Kekuasaan legal; (16) Karakteristik lembaga; (17) Kompetisi kelembagaan; (18) Kepatuhan; (19) Dukungan politis; dan (20) Daya tanggap.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan uraian berdasarkan data dan informasi yang diperoleh selama penelitian. Nawawi (1995) menyatakan bahwa metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan usaha mengemukakan hubungan satu sama lain dalam aspek-aspek yang diselidiki. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan usaha untuk memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengadakan klasifikasi gejala, menilai gejala, serta menetapkan standar dan hubungan antar berbagai gejala yang ditemukan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian untuk mengetahui persepsi warga berdasarkan pada usaha untuk membangun suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh (holistik),

dibentuk dengan kata-kata atau deskripsi dengan melaporkan pandangan dari responden, dilakukan dalam setting alamiah (Sudaryono, 2001). Sementara pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan perencanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini pada dasarnya merupakan studi evaluasi (*evaluation research*). Scriven dan Tayibnapi (2000) mengemukakan ada dua tipe evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan selama program berjalan dengan tujuan untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk perbaikan program. Sementara evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan setelah berakhirnya program untuk memberikan informasi tentang manfaat atau kegunaan program.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian sumatif karena mengevaluasi keadaan setelah program selesai dilaksanakan. Yang dimaksud program di sini adalah penyusunan rencana pembangunan permukiman yang dilakukan oleh masing-masing desa yang diteliti dengan produk akhir berupa dokumen Rencana Pembangunan Permukiman (RPP). Materi yang dievaluasi adalah persepsi warga dan tingkat keberhasilan pelaksanaan perencanaan yang dibuat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Garis besar langkah kerja dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: Penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu materi pertama adalah tentang persepsi masyarakat terhadap

RPP, materi kedua adalah tentang seberapa besar tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana, dan materi ketiga adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan rencana.

Instrumen yang digunakan dalam materi pertama adalah kuesioner. Dengan demikian penelitian pertama ini dapat disebut **survey kuesioner**. Lokasi pelaksanaan penelitian pertama adalah tiga desa sampel yaitu Desa Srimartani di Kecamatan Piyungan, Desa Karang Tengah di Kecamatan Imogiri, dan Desa Trimulyo di Kecamatan Jetis. Untuk setiap desa akan didistribusikan kuesioner (50 eksemplar per desa) kepada warga desa yang dipilih secara acak.

Dalam materi kedua, diambil 12 desa yang telah menyusun RPP di tahun 2007 (Tabel 1). Instrumen yang digunakan adalah daftar rencana kegiatan tahunan untuk tiga tahun pertama yang dimulai tahun 2008 s/d 2010 yang dikutip dari dokumen RPP masing-masing desa. Daftar rencana kegiatan tahunan tersebut dicocokkan dengan laporan pelaksanaan kegiatan tahunan RPP masing-masing desa. Disebabkan sumber data untuk materi ketiga ini adalah data sekunder maka metode yang digunakan dalam materi kedua ini dapat disebut sebagai **survey data sekunder**.

Pada materi ketiga dilakukan survey wawancara tentang alasan-alasan atau sebab-sebab yang membuat kegiatan yang direncanakan tidak terlaksana. Dengan kata lain metode untuk materi ketiga ini adalah **survey eksploratif**. Lokasi penelitian ini adalah 12 desa yang telah menyusun RPP di

tahun 2007. Responden untuk materi ketiga ini adalah kepala desa atau sekretaris desa atau kepala urusan ekonomi dan pembangunan atau pelaksana pekerjaan RPP.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi Masyarakat

Survey persepsi masyarakat terhadap RPP dilaksanakan di tiga desa di Kabupaten Bantul, yaitu Karang Tengah (Kecamatan Imogiri), Srimartani (Kecamatan Piyungan), dan Trimulyo (Kecamatan Jetis). Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, masing-masing desa sebanyak 50 eksemplar. Kuesioner tersebut berisi 13 pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan warga tentang RPP, peranan RPP, peran dan tanggung jawab warga dalam pelaksanaan RPP, dan sebagainya. Dari seluruh kuesioner yang dibagikan, semuanya dikembalikan tetapi ada dua eksemplar yang tidak diisi. Dengan demikian tingkat pengembalian kuesioner tersebut adalah 98,67%. Rekapitulasi jawaban kuesioner dapat dilihat pada Tabel 2.

Selain menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner, kepada setiap responden juga diminta komentar, harapan, kritik, atau apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan RPP. Dari 148 orang responden, 87 orang memberikan komentar, sisanya sebanyak 61 orang responden tidak memberikan komentar apapun atau tidak mengisi kolom isian yang disediakan. Setelah seluruh komentar,

Tabel 2
Rekapitulasi jawaban kuesioner persepsi

No.	Tema	Jawaban Positif		Jawaban Negatif		Tidak Tahu	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pengetahuan tentang RPP	144	97,30	4	2,70	-	-
2	Urgensi RPP	148	100,00	-	-	-	-
3	Harapan warga terhadap RPP	148	100,00	-	-	-	-
4	Sumbangsih RPP	146	98,65	2	1,35	-	-
5	Implementasi RPP	147	99,32	-	-	1	0,68
6	Kondisi lingkungan	147	99,32	1	0,68	-	-
7	Swadaya masyarakat	147	99,32	-	-	1	0,68
8	Partisipasi masyarakat	143	96,62	4	2,70	1	0,68
9	Kepedulian warga	145	97,97	2	1,35	1	0,68
10	Kesadaran warga	147	99,32	1	0,68	-	-
11	Gotong royong	147	99,32	1	0,68	-	-
12	Manfaat RPP	147	99,32	1	0,68	-	-
13	Inisiatif warga	147	99,32	1	0,68	-	-

(Sumber : hasil analisis)

Tabel 3
Ranking harapan, kritik, dan komentar responden

No.	Tema	Total
1	RPP perlu dilanjutkan	60
2	RPP sangat bermanfaat	27
3	Peningkatan implementasi RPP	16
4	RPP meningkatkan lingkungan	10
5	Pemberdayaan warga	7
6	RPP meningkatkan gotong royong/swadaya	6
7	Peningkatan transparansi	5
8	Kurangnya dukungan pemerintah	4
9	Peningkatan kualitas pembangunan	4
10	Capacity-building masyarakat	3
11	Kemungkinan RPP juga dapat meningkatkan ekonomi	2
12	Peran fasilitator dominan	1
13	Peningkatan sosialisasi RPP	1
14	RPP memperhatikan gender	1
15	RPP merupakan rencana "bottom-up"	1
16	RPP perlu direview	1
17	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal	1
18	Konsistensi dan komitmen terhadap RPP	1

(Sumber : hasil analisis)

harapan, dan kritik responden ditabulasikan, dilakukan penggabungan komentar-komentar tersebut dalam bentuk matrik untuk mengetahui jumlah masing-masing komentar. Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan matrik, diperoleh ranking komentar sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.

Dari data pada Tabel 3 dapat diperoleh gambaran bahwa seluruh responden memberikan perhatian yang besar terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan desa masing-masing, khususnya pembangunan permukiman. Hal ini tercermin dari jawaban responden terhadap seluruh pertanyaan kuesioner. Mayoritas responden memberikan jawaban positif dalam kaitannya dengan rencana pembangunan permukiman. Jawaban positif terhadap pertanyaan kuesioner ini juga didukung dengan pernyataan tertulis para responden yang menunjukkan mayoritas responden menghen-daki agar program RPP tetap dilanjutkan karena sangat bermanfaat, memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan permukiman mereka, dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Lebih jauh lagi, para responden juga menghendaki agar implementasi rencana pembangunan permukiman dan transparansi pelaksanaan RPP dapat ditingkatkan.

2. Evaluasi Pelaksanaan RPP

Telah disampaikan pada bagian sebelumnya bahwa instrumen yang digunakan dalam survey pelaksanaan RPP adalah daftar rencana kegiatan

tahunan tiap desa yang dikutip dari dokumen RPP dan dibandingkan dengan laporan realisasi kegiatan tahunan untuk tiga tahun pertama. Hasil dari perbandingan ini seluruhnya disajikan dalam Tabel 4.

Dari Tabel 4 diperoleh gambaran menyeluruh tentang implementasi rencana pembangunan permukiman di 12 desa yang diteliti. Dapat dikatakan bahwa implementasi rencana pembangunan permukiman di 12 desa tersebut kurang berhasil. Hal ini dapat dilihat dari capaian pelaksanaan rencana untuk setiap tahun anggaran yang angkanya secara rata-rata hanya pada kisaran 30%. Untuk tahun anggaran 2008, rata-rata setiap desa membuat rencana pembangunan permukiman dengan anggaran lebih dari tiga milyar rupiah, sementara implementasinya rata-rata kurang dari satu milyar rupiah. Dengan demikian, implementasi rencana untuk tahun anggaran 2008 secara rata-rata mencapai 31,15%. Pada tahun 2009 setiap desa rata-rata menganggarkan rencana pembangunan permukiman sekitar 1,6 milyar rupiah dengan realisasi mencapai lebih dari 420 juta rupiah, sehingga capaian implementasinya sebesar 26,95%. Yang terakhir pada tahun anggaran 2010, setiap desa rata-rata membuat rencana pembangunan permukiman dengan anggaran lebih dari dua milyar rupiah. Realisasi rencana untuk tahun anggaran 2010 untuk setiap desa rata-rata lebih dari 320 juta rupiah. Dengan demikian, implementasi rencana pembangunan permukiman untuk tahun anggaran ini mencapai kurang dari 16%.

Tabel 4
Rekapitulasi Hasil Survey Implementasi RPP

No.	Desa	Tahun Anggaran 2008			Tahun Anggaran 2009			Tahun Anggaran 2010			% Kum.
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%	
1	Karang Tengah	4.180.000.000	3.101.294.000	74,19	376.000.000	268.628.000	71,44	1.050.000.000	270.000.000	25,71	64,93
2	Srimartani	2.262.600.000	691.000.000	30,54	3.654.400.000	440.500.000	12,05	2.406.000.000	179.500.000	7,46	15,75
3	Trimulyo	6.622.000.000	868.000.000	13,11	2.543.500.000	795.000.000	31,26	380.000.000	110.000.000	28,95	18,57
4	Gadingharjo	327.000.000	327.000.000	100,00	2.851.200.000	900.000.000	31,57	6.302.400.000	160.000.000	2,54	14,63
5	Sitimulyo	5.452.690.000	551.400.000	10,11	4.136.100.000	443.000.000	10,71	5.732.100.000	500.000.000	8,72	9,75
6	Poncosari	3.648.000.000	868.000.000	23,79	545.000.000	479.812.300	88,04	110.000.000	96.936.350	88,12	33,58
7	Seloharjo	3.653.000.000	1.428.000.000	39,09	1.150.000.000	718.000.000	62,43	445.000.000	150.000.000	33,71	43,75
8	Wonokromo	690.000.000	490.000.000	71,01	1.213.000.000	379.000.000	31,24	2.496.000.000	977.000.000	39,14	41,96
9	Sumbermulyo	2.164.146.000	1.077.146.000	49,77	1.293.000.000	237.000.000	18,33	2.232.000.000	647.000.000	28,99	34,47
10	Caturharjo	1.000.647.500	240.412.000	24,03	586.759.000	210.630.000	35,90	1.487.254.800	338.210.000	22,74	25,67
11	Argorejo	1.177.371.686	592.940.000	50,36	439.691.000	180.981.000	41,16	269.226.000	157.931.000	58,66	49,40
12	Terong	5.580.000.000	1.215.000.000	21,77	315.000.000	96.000.000	30,48	1.315.000.000	258.750.000	19,68	21,77

(Sumber : hasil analisis)

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi RPP

Dari uraian tentang implementasi RPP pada bagian sebelumnya ditambah hasil wawancara dan jawaban kuesioner diperoleh berbagai macam alasan yang menyebabkan suatu kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan. Alasan yang paling umum atau dijumpai pada seluruh desa yang diteliti adalah ketiadaan anggaran. Alasan kedua adalah tidak dikabulkannya permintaan bantuan. Uraian tentang alasan-alasan tersebut selengkapnya ditampilkan pada Tabel 5.

Jika digabungkan menjadi satu maka diperoleh 12 alasan tidak terlaksananya kegiatan yang direncanakan di dalam RPP. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Anggaran terbatas; 2) Bantuan tidak dikabulkan; 3) Tidak ada swadaya; 4) Kegiatan dilaksanakan bertahap; 5) Bukan prioritas; 6) Belum perlu dilaksanakan; 7) Kegiatan lintas desa; 8) Swadaya terbatas; 9) Kurangnya kesadaran warga untuk berkorban; 10) Terlalu banyak kegiatan; 11) Sumber dana terbatas; dan 12) Kesalahan teknis. Untuk mengetahui frekuensi masing-masing alasan dibuat matrik sebagaimana ditampilkan pada Tabel 6.

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa berdasarkan frekuensinya diperoleh alasan yang paling dominan adalah keterbatasan anggaran dan tidak terkabulnya bantuan, keduanya dijumpai di 12 desa yang diteliti. Disusul pada peringkat kedua adalah alasan tidak ada swadaya yang terjadi di sembilan desa

yang diteliti. Di posisi ketiga adalah alasan kegiatan bertahap yang ditemukan di delapan desa yang diteliti. Pada peringkat keempat terdapat lima alasan yaitu kegiatan bukan prioritas, kegiatan lintas desa, swadaya terbatas, terlalu banyak kegiatan, dan sumber dana terbatas yang masing-masing ditemukan di tiga desa yang diteliti. Pada peringkat kelima terdapat dua alasan yaitu kegiatan belum perlu dilaksanakan dan kesalahan teknis, masing-masing dijumpai di dua desa yang diteliti. Dan yang terakhir pada peringkat keenam adalah alasan kurangnya kesadaran warga untuk berkorban yang ditemukan di satu desa yang diteliti.

Jika alasan-alasan tersebut diklasifikasi lebih lanjut, yaitu dengan menggabungkan alasan-alasan yang sejenis, maka diperoleh enam faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi RPP (lihat Tabel 7).

Klasifikasi di atas disusun berdasarkan besarnya pengaruh setiap faktor, dimulai dari faktor yang paling besar pengaruhnya, yaitu anggaran, sampai dengan faktor yang memiliki pengaruh paling kecil, yaitu kesadaran warga. Faktor anggaran merupakan gabungan dari alasan anggaran terbatas (dijumpai di semua desa yang diteliti), bantuan tidak terkabul (juga ditemukan di semua desa), dan sumber dana terbatas (ditemukan di tiga desa). Devas dan Rakodi (1993) menyebut faktor ini dengan istilah sumber keuangan sementara Grindle (1980) menyebutnya dengan istilah sumber daya finansial. Faktor kedua adalah variasi rencana, yang merupakan gabungan dari alasan kegiatan bertahap (ditemukan di delapan desa), kegiatan lintas desa

Tabel 5
Kompilasi alasan tidak terlaksananya rencana

No.	Desa	Alasan tidak terlaksananya rencana
1	Karang Tengah	<ul style="list-style-type: none">• Anggaran terbatas• Beberapa permintaan bantuan tidak dikabulkan• Tidak ada swadaya• Ada kegiatan yang dilaksanakan bertahap• Banyak kegiatan bukan merupakan prioritas (masih bisa ditunda)• Ada kegiatan yang belum perlu dilaksanakan
2	Srimartani	<ul style="list-style-type: none">• Anggaran tidak mencukupi• Beberapa permintaan bantuan tidak dikabulkan• Beberapa kegiatan bukan merupakan prioritas (masih bisa ditunda)• Tidak ada swadaya• Ada kegiatan yang belum perlu dilaksanakan• Ada kegiatan yang dilaksanakan lintas desa• Terlalu banyak kegiatan
3	Trimulyo	<ul style="list-style-type: none">• Anggaran tidak mencukupi• Beberapa permintaan bantuan tidak terakbul• Swadaya terbatas• Ada kegiatan yang dilaksanakan bertahap• Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan lintas desa• Beberapa kegiatan bukan merupakan prioritas (masih bisa ditunda)
4	Gadingharjo	<ul style="list-style-type: none">• Anggaran tidak mencukupi• Tidak dikabulkannya permintaan bantuan• Tidak ada swadaya• Ada kegiatan yang dilaksanakan bertahap• Kurangnya kesadaran warga untuk berkorban demi pembangunan desa
5	Sitimulyo	<ul style="list-style-type: none">• Anggaran sangat tidak mencukupi (kegiatan yang direncanakan terlalu banyak)• Tidak dikabulkannya beberapa permintaan bantuan• Tidak ada swadaya• Ada kegiatan yang dilaksanakan bertahap
6	Poncosari	<ul style="list-style-type: none">• Anggaran tidak mencukupi• Tidak dikabulkannya permintaan bantuan• Tidak ada swadaya• Ada kegiatan yang dilaksanakan bertahap• Sumber dana terbatas• Terlalu banyak kegiatan
7	Seloharjo	<ul style="list-style-type: none">• Anggaran tidak mencukupi• Tidak dikabulkannya beberapa permintaan bantuan• Swadaya sangat kecil• Sumber dana terbatas

No.	Desa	Alasan tidak terlaksananya rencana
8	Wonokromo	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran tidak mencukupi • Beberapa permintaan bantuan tidak dikabulkan • Tidak ada swadaya • Ada kegiatan yang dilaksanakan bertahap
9	Sumbermulyo	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran tidak mencukupi • Beberapa permintaan bantuan tidak dikabulkan • Ada beberapa kegiatan bersifat multi-years • beberapa kegiatan dilaksanakan secara lintas desa • Swadaya terbatas
10	Caturharjo	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran tidak mencukupi • Beberapa permintaan bantuan tidak dikabulkan • Tidak ada swadaya • Ada kegiatan yang dilaksanakan bertahap • Kekeliruan teknis dalam proposal permintaan bantuan
11	Argorejo	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran tidak mencukupi • Tidak dikabulkannya beberapa permintaan bantuan • Tidak ada swadaya • Sumber dana terbatas
12	Terong	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran tidak mencukupi • Tidak dikabulkannya beberapa permintaan bantuan • Tidak ada swadaya • Ada kegiatan yang dilaksanakan bertahap • Kekeliruan teknis dalam pelaksanaan kegiatan

(Sumber: Laporan Realisasi RPP, jawaban kuesioner, dan wawancara)

Tabel 6
Matrik penghitungan frekuensi alasan

No.	Alasan	Nama Desa											Jml	
		Krtgh	Srmtn	Trmly	Gdhrj	Stmy	Pcsr	Slhj	Wnkm	Sbmy	Cthj	Agrj		Trg
1	Anggaran terbatas	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	12
2	Bantuan tidak terakbul	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	12
3	Tidak ada swadaya	v	v		v	v	v		v		v	v	v	9
4	Kegiatan bertahap	v		v	v		v		v	v	v		v	8
5	Bukan prioritas	v	v	v										3
6	Belum perlu dilaksanakan	v	v											2
7	Kegiatan lintas desa		v	v						v				3
8	Swadaya terbatas			v				v		v				3
9	Kesadaran warga kurang				v									1
10	Terlalu banyak kegiatan	v				v	v							3
11	Sumber dana terbatas						v	v				v		3
12	Kesalahan teknis										v		v	2

(Sumber : hasil analisis)

Tabel 7
Klasifikasi alasan menjadi faktor

No.	Alasan	Desa	Faktor
1	Anggaran terbatas	12	Anggaran
2	Bantuan tidak terkabul	12	
3	Sumber dana terbatas	3	
4	Kegiatan bertahap	8	Variasi rencana
5	Kegiatan lintas desa	3	
6	Bukan prioritas	3	
7	Belum perlu dilaksanakan	2	
8	Tidak ada swadaya	9	Dukungan warga
9	Swadaya terbatas	3	
10	Terlalu banyak kegiatan	3	Jumlah rencana
11	Kesalahan teknis	2	Kesalahan teknis
12	Kesadaran warga kurang	1	Kesadaran warga

(Sumber : hasil analisis)

(ditemukan di tiga desa), bukan kegiatan prioritas (dijumpai di tiga desa), dan kegiatan yang belum perlu dilaksanakan (ditemukan di dua desa). Presman dan Wildavsky (1973) menyebut faktor ini dengan istilah kejelasan rencana. Faktor ketiga adalah dukungan warga yang merupakan gabungan dari alasan tidak ada swadaya (ditemukan di sembilan desa) dan swadaya terbatas (ditemukan di tiga desa). Warwick (1979) menyebut faktor ini dengan sebutan dukungan kelompok. Faktor keempat adalah jumlah rencana yang merupakan ditemukan di tiga desa yang diteliti. Presman dan Wildavsky (1973) menyebut faktor ini dengan sebutan kompleksitas rencana. Faktor kelima adalah kesalahan teknis yang dijumpai di dua desa. Telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa penyebab utama dari faktor ini adalah kekeliruan dalam mengelola informasi. Oleh Goggin et. al. (1990) faktor ini disebut informasi, sementara Edward III (1980) menyebutnya dengan istilah

kejelasan informasi. Faktor terakhir adalah kesadaran warga yang ditemukan di satu desa. Edward III (1980) menyebut faktor ini dengan istilah komitmen. Jika hasil temuan penelitian ini disandingkan dengan pendapat beberapa orang ahli, maka dapat diperoleh gambaran sebagaimana ditampilkan pada Tabel 8.

4. Keterkaitan antara Persepsi dan Capaian Implementasi

Hasil survey persepsi masyarakat menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan jawaban positif terhadap seluruh topik yang ditanyakan. Topik-topik tersebut berkaitan dengan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan RPP, meliputi informasi, urgensi, harapan warga, sumbangan, pelaksanaan, lingkungan permukiman desa, swadaya, partisipasi masyarakat, kepedulian warga, kesadaran/kerelaan warga, semangat gotong royong, manfaat, dan inisiatif warga untuk

Tabel 8
Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

No.	Temuan Penelitian	Pendapat Ahli
1	Anggaran	- Sumber keuangan (Devas dan Rakodi, 1993) - Sumber daya finansial (Grindle, 1980)
2	Variasi rencana	Kejelasan rencana (Presman dan Wildavsky, 1973)
3	Dukungan warga	Dukungan kelompok (Warwick, 1979)
4	Jumlah rencana	Kompleksitas rencana (Presman dan Wildavsky, 1973)
5	Kesalahan teknis	- Informasi (Goggin et. al., 1990) - Kejelasan informasi (Edward III, 1980)
6	Kesadaran warga	Komitmen (Edward III, 1980)

(Sumber : hasil analisis)

menyukkseskan pelaksanaan RPP. Selain topik-topik tersebut, kepada responden juga diminta untuk memberikan komentar, kritik, saran, harapan, atau apapun yang berkaitan dengan RPP. Dari seluruh komentar yang diberikan, mayoritas responden menghendaki keberlanjutan RPP dan menganggap RPP sangat bermanfaat bagi lingkungan permukiman mereka.

Di sisi lain, berdasarkan survey pelaksanaan RPP, capaian realisasi rencana pembangunan permukiman menunjukkan hasil yang tidak begitu tinggi (rata-rata sekitar 30%). Penyebab dari rendahnya capaian realisasi ini juga telah diketahui. Ada 12 alasan mengapa suatu kegiatan yang telah direncanakan tidak bisa dilaksanakan atau hanya terlaksana sebagian saja. Kemudian setelah dilakukan analisis terhadap alasan-alasan tersebut, diperoleh enam faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi RPP. Faktor-faktor tersebut meliputi anggaran, variasi

rencana, dukungan warga, jumlah rencana, kesalahan teknis, dan kesadaran warga.

Terdapat kontradiksi antara persepsi masyarakat terhadap RPP dengan capaian implementasi RPP. Di satu sisi, persepsi warga (responden) begitu tinggi terhadap RPP, sementara di sisi lain, capaian implementasi RPP rendah. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat desa yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pembangunan lingkungan mereka. Masyarakat desa juga memiliki rasa kebersamaan yang kuat, semangat gotong royong, dan kesediaan berpartisipasi dalam kegiatan kolektif. Di lain pihak, masyarakat desa memiliki kelemahan dalam sumber daya, khususnya sumber daya ekonomi. Inilah sebabnya mengapa persepsi responden sangat tinggi terhadap RPP sementara capaian implementasi RPP sangat rendah.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mayoritas responden menganggap bahwa RPP penting, perlu dilanjutkan, dan bermanfaat. Mayoritas responden juga menganggap RPP memberikan dorongan positif terhadap peningkatan kondisi lingkungan, swadaya, partisipasi, kepedulian, kesadaran, gotong royong, dan inisiatif warga.
- b. Pelajaran yang dapat diambil yaitu bahwa seluruh desa yang membuat dokumen RPP sama sekali tidak memiliki anggaran sendiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang direncanakan, kecuali tiga desa, yaitu Trimulyo, Seloharjo, dan Sumbermulyo, yang mampu menghimpun swadaya masyarakat walaupun jumlahnya sangat kecil bila dibandingkan dengan seluruh kebutuhan anggaran untuk melaksanakan rencana pembangunan permukiman.
- c. Secara kumulatif, implementasi RPP di 12 desa yang diteliti menunjukkan hasil bervariasi. Berdasarkan anggaran, persentase tertinggi dicapai oleh Desa Karang Tengah (64,93%), sementara persentase terkecil dicapai oleh Desa Sitimulyo (9,75%).
- d. Dari kompilasi pendapat para ahli diperoleh 20 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Tetapi dalam penelitian ini hanya ada enam faktor yang menentukan keberhasilan implementasi RPP, yaitu **anggaran** atau sumber keuangan (Devas dan Rakodi, 1993) atau sumber daya finansial (Grindle, 1980), **variasi rencana** atau kejelasan rencana (Presman dan Wildavsky, 1973), **dukungan warga** atau dukungan kelompok (Warwick, 1979), **jumlah rencana** atau kompleksitas rencana (Presman dan Wildavsky, 1973), **kesalahan teknis** atau informasi (Goggin et al., 1990), dan **kesadaran warga** atau komitmen (Edward III, 1980). Tidak ditemukan faktor baru selain yang telah diungkapkan oleh para ahli.
- e. Di antara enam faktor penentu keberhasilan implementasi RPP tersebut, **anggaran** merupakan faktor yang paling dominan disebabkan seluruh desa yang menyusun RPP tidak memiliki anggaran sendiri untuk merealisasikannya.
- f. Terdapat kontradiksi antara persepsi warga dengan capaian implementasi RPP. Di satu sisi warga memberikan pandangan positif terhadap keberadaan RPP sementara di sisi lainnya capaian implementasi RPP rendah. Hal ini disebabkan warga desa memiliki semangat yang tinggi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan desa mereka, sementara di sisi lain warga desa lemah dalam sumber daya keuangan.

2. Implikasi

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap rencana pembangunan permukiman (RPP) ditinjau dari kemanfaatannya; kedua, untuk mengetahui seberapa besar capaian implementasi RPP; dan ketiga, menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi RPP. Dalam kaitannya dengan tujuan ketiga, diperoleh beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi RPP. Walaupun tidak ada faktor baru, namun diperoleh variasi di antara faktor-faktor tersebut. Variasi yang dimaksud adalah pada faktor anggaran yang oleh Devas dan Rakodi (1993) disebut faktor sumber keuangan dan oleh Grindle (1980) disebut faktor sumber daya finansial. Yang perlu dicatat di sini yaitu bahwa faktor anggaran ini sesungguhnya adalah faktor ketergantungan mutlak desa-desa yang diteliti. Hal ini disebabkan desa-desa yang diteliti membuat rencana kegiatan pembangunan permukiman yang begitu besar dari sisi anggaran tetapi sama sekali tidak memiliki dana untuk merealisasikannya. Anggaran untuk melaksanakan rencana kegiatan tersebut sepenuhnya ada di tangan penyanggah dana.
- b. Obyek penelitian ini adalah desa-desa yang telah menyusun rencana pembangunan permukiman (RPP) di tahun 2007. Pertanyaan yang masih perlu dijawab adalah seberapa besar sumbangan RPP terhadap peningkatan lingkungan

permukiman desa? Apakah ada perbedaan pembangunan permukiman antara desa yang telah menyusun RPP dengan desa yang belum menyusun RPP? Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang perbandingan pembangunan lingkungan permukiman antara desa yang telah menyusun RPP dengan desa yang belum menyusun RPP. Penelitian lebih lanjut juga perlu dilakukan dalam kaitannya dengan upaya-upaya desa untuk meraih sebanyak mungkin anggaran guna meningkatkan capaian realisasi rencana-rencana pembangunan permukiman yang dibuat.

3. Rekomendasi

- a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi warga terhadap RPP begitu tinggi sementara di pihak lain capaian implementasinya begitu rendah. Diperlukan campur tangan pemerintah untuk meningkatkan keberdayaan warga dalam bentuk bantuan dana langsung atau stimulan dalam pembangunan permukiman.
- b. Dalam penyusunan RPP diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah desa dengan pihak-pihak penyanggah untuk meningkatkan sinergisme.
- c. Diperlukan upaya-upaya *follow-up* yang lebih intensif dari pemerintah desa dan warganya untuk meningkatkan capaian implementasi RPP.
- d. Diperlukan dukungan penuh dari seluruh *stakeholders* desa untuk sukseskan implementasi RPP di masa datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1992, *Undang-undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman*, Djambatan, Jakarta.
- , 1987, *Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/KPTS/1987 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana*, Djambatan, Jakarta.
- , 2007, *Dokumen Rencana Pembangunan Permukiman (RPP)*, Desa Karang Tengah, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
- , 2007, *Dokumen Rencana Pembangunan Permukiman (RPP)*, Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
- , 2007, *Dokumen Rencana Pembangunan Permukiman (RPP)*, Desa Trimulyo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
- , 2007, *Dokumen Rencana Pembangunan Permukiman (RPP)*, Desa Gadingharjo, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
- , 2007, *Dokumen Rencana Pembangunan Permukiman (RPP)*, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
- , 2007, *Dokumen Rencana Pembangunan Permukiman (RPP)*, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
- , 2007, *Dokumen Rencana Pembangunan Permukiman (RPP)*, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
- , 2007, *Dokumen Rencana Pembangunan Permukiman (RPP)*, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
- , 2007, *Dokumen Rencana Pembangunan Permukiman (RPP)*, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
- , 2007, *Dokumen Rencana Pembangunan Permukiman (RPP)*, Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
- , 2007, *Dokumen Rencana Pembangunan Permukiman (RPP)*, Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
- , 2007, *Dokumen Rencana Pembangunan Permukiman (RPP)*, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

- Alexander, E. R., 1986, *Approach to Planning*, Gordon and Breach Science Publishers, Montreaux, Switzerland.
- B. C., Smith, 1993, *New Approach to Urban Planning and Management in the Developing World*, John Wiley and Sons, New York.
- Bryant, C. And White, L. G., 1987, *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta.
- Cheema, G. S. and Rondinelli, D. A., 1993, *Decentralization and Development Policy Implementation in Development Countries*, Beverly Hills, Sage Publications.
- Conyers, D. and Hills, P., 1984, *An Introduction to Development Planning in the Third World*, John Wiley and Sons, New York.
- Devas dan Rakodi, 1993, *Managing Fast Growing Cities: A New Approach to Urban Planning and Management in the Developing World*, Washington D.C., Congressional Quarterly Inc.
- Dunn, W. N., 2000, *Analisa Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Edwards, G. C. III, 1980, *Implementation and Public Policy*, Washington D. C., Congressional Quarterly Inc.
- Faludi, Andreas, 1973, *A Readers in Planning Theory*, Pergamon Press, New York.
- Goggin, M. L., et. al., 1990, *Implementation Theory and Practice Toward a Third Generation*, Glenview, I.L., Scott, Foresman Little Brown Higher Education.
- Grindle, M. S., 1980, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton NJ, Princeton University Press.
- Isaac, Stephen and Michael, William B., 1985, *Handbook in Research and Evaluation*, Second Edition, Edits Publishers, San Diego, California.
- Kuswartojo, T., *Membuat Pembangunan Berlanjut*, diterbitkan oleh Agenda 21 Sektorial Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Mintzberg, Henry, 1994, *The Rise and Fall of Strategic Planning, Reconceiving Rules for Planning, Plans, Planners*, The Free Press, New York.

Nawawi, H. Hadari, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Setiawan, Bhakti, 2003, *Pembangunan Masyarakat dan Perencanaan Partisipatif, Konsep Dasar dan Faktor-faktor Kesuksesan*, makalah pada pelatihan participatory planning, MPKD, UGM, bekerjasama dengan Bali Urban Infrastructure Programme (BUIP).

Tayibnapi, F. Y., 2000, *Evaluasi Program*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 1997, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Wibawa, S., 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.